

**KEPENTINGAN INDONESIA DALAM KEBIJAKAN EKSPOR NIKEL DI  
ERA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO PERIODE 2020-2024**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**AHMAD RIFA'I ARIEF  
NPM 1816071053**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

### KEPENTINGAN INDONESIA DALAM KEBIJAKAN EKSPOR NIKEL DI ERA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO PERIODE 2020-2024

Oleh

Ahmad Rifa'i Arief

Penelitian ini menganalisis kepentingan Indonesia dalam kebijakan ekspor nikel selama periode pemerintahan Joko Widodo (2020–2024), dengan fokus pada pelarangan ekspor bijih nikel mentah untuk mendorong hilirisasi industri. Sebagai pemilik 54% cadangan nikel global, Indonesia bertujuan meningkatkan nilai tambah ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis data sekunder menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil meningkatkan nilai ekspor produk hilir nikel dari USD 1,2 miliar (2019) menjadi USD 45 miliar (2024), menarik investasi asing senilai USD 35 miliar, serta menciptakan 48.000 lapangan kerja langsung. Namun, tantangan seperti gugatan Uni Eropa di WTO, dominasi investasi asing (terutama China), dan ketergantungan teknologi mengancam keberlanjutan kebijakan. Melalui perspektif teori kepentingan nasional (Keohane) dan hilirisasi (List), peneliti menyimpulkan bahwa kepentingan Indonesia dalam kebijakan larangan ekspor nikel adalah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan transfer teknologi asing. Rekomendasi mencakup peningkatan anggaran riset, reformasi regulasi ketenagakerjaan, serta diversifikasi kerja sama internasional.

**Kata Kunci:** Hilirisasi, Investasi Asing, Kebijakan Ekspor Nikel, Kepentingan Nasional, Transfer Teknologi.

**ABSTRACT****INDONESIA'S INTERESTS IN NICKEL EXPORT POLICY IN THE ERA  
OF JOKO WIDODO'S GOVERNMENT 2020-2024 PERIOD****By****Ahmad Rifa'i Arief**

This study examines Indonesia's interests in restricting raw nickel ore exports under President Joko Widodo's administration (2020–2024) to advance industrial downstreaming. As the world's largest nickel reserve holder (54% of global reserves), Indonesia seeks to enhance economic value-added, reduce raw material dependency, and generate employment. Using qualitative methods with secondary data analysis, the research finds that the policy increased processed nickel exports from USD 1.2 billion (2019) to USD 45 billion (2024), attracted USD 35 billion in foreign investment, and created 48,000 direct jobs. However, challenges such as the EU's WTO dispute, Chinese investment dominance, and technological reliance threaten long-term sustainability. Through Keohane's national interest theory and List's downstreaming framework, the study concludes that Indonesia's interests in the nickel export ban policy are to increase employment, increase economic added value, and transfer foreign technology.. Recommendations emphasize R&D funding, labor regulation reforms, and diversified international partnerships.

**Keywords:** Downstreaming, Foreign Investment, National Interest, Nickel Export Policy, Technology Transfer.

**KEPENTINGAN INDONESIA DALAM KEBIJAKAN EKSPOR NIKEL DI  
ERA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO PERIODE 2020-2024**

**Oleh**

**AHMAD RIFA'I ARIEF**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

**SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Jurusan Hubungan Internasional**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2025**

Judul Skripsi : Kepentingan Indonesia Dalam Kebijakan Ekspor  
Nikel di Era Pemerintahan Joko Widodo Periode  
2020-2024

Nama Mahasiswa : *Ahmad Rifa'i Arief*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1816071053

Program Studi : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Tety Rachmawati, S.IP., M.A.**

NIP. 199203092019032020

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

**Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.AN., M.P.A.**

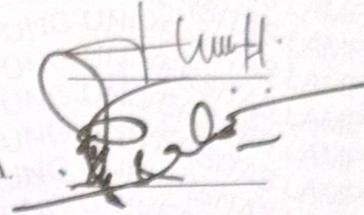
NIP. 198106282005011003

## MENGESAHKAN

## 1. Tim Penguji

Ketua : Tety Rachmawati, S.IP., M.A.

Penguji Utama : Rahayu Lestari, S.I.Kom., M.A.



## 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.**

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Juni 2025

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 9 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Rifa'i Arief

NPM. 1816071053

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Ahmad Rifa'i Arief, lahir di Bandar Lampung pada 4 Mei 2000. Ia merupakan anak keempat dari pasangan Bapak Abadi Yusuf dan Ibu Yuningsih. Peneliti memulai pendidikan formalnya di Taman Kanak-kanak (TK) Permata Biru pada 2005–2006. Selanjutnya, ia melanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri 1 Sukarame Bandar Lampung (2006–2012), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Bandar Lampung (2012–2015), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung (2015–2018).

Pada tahun 2018, peneliti melanjutkan pendidikan tinggi di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, ia aktif dalam berbagai kegiatan organisasi diluar kampus. Pada tahun 2019, peneliti menjadi anggota tim Marching Band yang berpartisipasi dalam kegiatan Bandung Marching Band Championship (BMBC) 2019 dan mendapatkan gelar Juara Umum. Pada tahun 2022, ia mengikuti Kejuaran Nasional (KEJURNAS) Drumband di Madiun, Jawa Timur dan mendapatkan 1 medali emas. Kemudian, pada tahun berikutnya, peneliti mengikuti Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BKPON) cabang olahraga drumband yang bertepatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.”

-(Q.S. Al-Baqarah: 286)-

“Keep on going with your silly dream. Life is Prettier than it may seem”

-Laufey-

## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat dan kekuatan tiada henti, sehingga aku dapat mencapai titik ini.

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang tercinta dalam hidupku.

### **Orang Tuaku Tercinta**

(Bapak Abadi Yusuf dan Ibu Yuningsih)

### **My Support System**

(Anggun Nurhalimah)

Terima kasih atas doa yang tiada henti, kesabaran, ketulusan, pengorbanan, perjuangan, serta cinta kasih luar biasa yang telah kalian berikan kepada Arif. Ucapan terima kasih ini tidak akan pernah mampu menggantikan segala yang telah kalian berikan selama ini.

Karya ini kupersembahkan sebagai ungkapan rasa sayang dan hormat untuk kalian, yang sangat berarti dan berharga bagiku di dunia ini. Maafkan atas perjalanan yang tidak sempurna.

## SANWACANA

Puji serta syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan petunjuk-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kepentingan Indonesia Dalam Kebijakan Ekspor Nikel Di Era Pemerintahan Joko Widodo Periode 2020-2024.” Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini, peneliti mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu izinkan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad S.A.W., yang telah menyampaikan risalah Islam dan akan memberikan syafaat kepada umatnya di hari akhir.
2. Prof. Dr. Ir. Lusmeila Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
3. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
5. Mba Gita Karisma, S.IP., M. Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Mba Tety Rachmawati, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama peneliti yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, berdiskusi, memberikan masukan dan nasihat kepada peneliti dengan penuh kesabaran, agar peneliti tetap percaya diri dengan tulisan yang peneliti buat.

7. Mba Rahayu Lestari, M.A. selaku Dosen Pembahas yang senantiasa memberikan masukan dan arahan terbaik, serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh jajaran Dosen Hubungan Internasional beserta staf Jurusan yang telah membantu dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada peneliti.
9. Teristimewa peneliti persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Abadi Yusuf dan Ibu Yuningsih. Terima kasih atas berjuta doa yang telah Bapak dan Ibu panjatkan untukku serta kesabaran yang tak terhingga luasnya untuk menunggu aku menyelesaikan studinya yang tidak tepat waktu.
10. Untuk kakak-kakak dan adikku tercinta, Intan Rahmawati, Yudi Hermawan, Annisa Novaliani, Rizky Ardani. Terima kasih atas dukunganmu yang tulus, serta semangat yang tak pernah putus kau berikan. Kehadiranmu menjadi penyemangat dalam setiap langkahku, meskipun perjalanan ini penuh tantangan. Arif berharap, apa yang Arif capai ini bisa menjadi kebanggaan bagi kalian semua.
11. Yang tercinta Anggun Nurhalimah, terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada dan telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini.
12. Sahabatku di masa kuliah yang sekaligus menjadi teman seperjuangan menempuh gelar S1, Frenshy Tiara Sari, Deswan Firlyan, Deo Bernedy Putra, Dimas Rezza Pratama. Terima kasih sudah menemani baik dalam susah maupun senang sejak awal perkuliahan, serta selalu mendukung peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
13. Seluruh teman di Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2018 yang telah menjadi bagian dari fase kehidupan peneliti. Terima kasih atas berbagai kesempatan dan kebaikan yang tak bisa peneliti tulis satu persatu. Semoga kesuksesan menemukan jalannya kepada kita semua.
14. Terakhir, terima kasih kepada diriku sendiri yang telah berjuang tanpa henti dan bertahan melewati segala rintangan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan waktu dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala bentuk kritik, saran, dan masukan yang membangun dari seluruh pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 11 Juni 2025

Peneliti,

Ahmad Rifa'i Arief

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Konseptual .....	14
2.2.1 Kepentingan Nasional.....	14
2.2.2 Hilirisasi.....	16
2.3 Kerangka Pemikiran .....	17
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	19
3.1 Tipe Penelitian.....	19
3.2 Fokus Penelitian .....	19
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	19
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	20

3.5	Teknik Analisis Data .....	20
<b>IV.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>22</b>
4.1	Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia .....	22
4.2	Kepentingan Indonesia Dalam Kebijakan Ekspor Nikel.....	29
4.2.1	Membuka Lapangan Pekerjaan .....	30
4.2.2	Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi .....	35
4.2.3	Kepentingan Transfer Teknologi Asing.....	48
<b>V.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
5.1	Kesimpulan.....	56
5.2	Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>59</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Tren Produksi Nikel Global Tahun 2019-2023.....	2
Gambar 1. 2 Cadangan Nikel Dunia Tahun 2023 .....	2
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran .....	18
Gambar 4. 1 Pertumbuhan Jumlah Smelter di Indonesia.....	25
Gambar 4. 2 Investasi Smelter per Negara Asal Tahun 2024 .....	27
Gambar 4. 3 Pertumbuhan Lapangan Kerja Langsung (2020-2023) .....	32
Gambar 4. 4 Pertumbuhan Ekspor Nikel Indonesia.....	36
Gambar 4. 5 Kontribusi Ekspor Nikel terhadap PDB (2023) .....	37
Gambar 4. 6 Komposisi Produk Hilir Nikel Indonesia (2023) .....	39
Gambar 4. 7 Pertumbuhan Ekspor Nikel Indonesia.....	43
Gambar 4. 8 Grafik Pertumbuhan Harga Produk Nikel (2020-2024).....	45
Gambar 4. 9 Alur Pasokan Nikel Global China.....	52
Gambar 4. 10 Perbandingan PDB Dialokasikan untuk R&D .....	54

**DAFTAR TABEL**

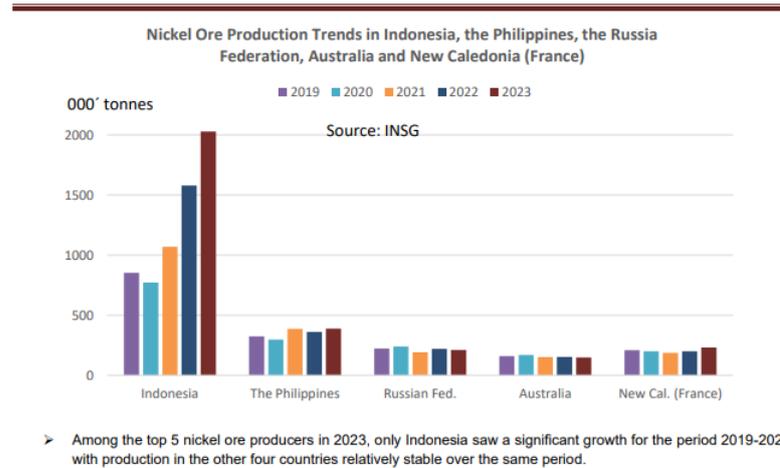
Tabel 4. 1 Kebutuhan Pasokan Nikel Global (2020-2024) .....	23
Tabel 4. 2 Kawasan Industri Nikel di Indonesia .....	39
Tabel 4. 3 Pangsa Pasar Global Nikel Indonesia & Pesaing Utama .....	40
Tabel 4. 4 Perbandingan Ekspor Nikel dengan Negara Lain (2023) .....	46
Tabel 4. 5 Investasi China di Negara Produsen Global (2024).....	51

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

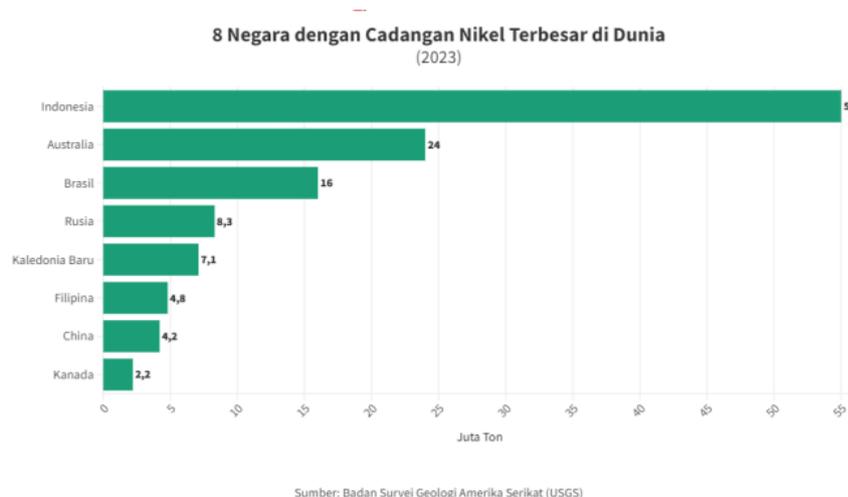
Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar dengan jumlah 54% dari total cadangan nikel di dunia, menjadikan komoditas ini sebagai salah satu sumber daya strategis yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2023 Indonesia mengalami peningkatan produksi nikel terbesar di dunia dengan produksi sebanyak 2,028,000 ton naik 28% dibandingkan tahun 2022 dengan produksi sebanyak 1,578,000 ton. (International Nickel Study Group, 2022) Nikel tidak hanya menjadi andalan dalam ekspor, tetapi juga menjadi bahan baku utama bagi industri-industri global, terutama dalam produksi baterai kendaraan listrik dan baja tahan karat. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan global terhadap nikel terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi hijau dan transisi energi global. Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi yang strategis dalam peta perdagangan internasional, sekaligus menuntut pemerintah untuk merumuskan kebijakan ekspor yang tepat guna memaksimalkan manfaat ekonomi dan menjaga keberlanjutan lingkungan (International Nickel Study Group, 2022).

Posisi strategis Indonesia dalam industri nikel global semakin penting seiring dengan meningkatnya permintaan nikel dunia. Transisi energi global yang dipicu oleh komitmen berbagai negara untuk mengurangi emisi karbon telah mendorong permintaan terhadap nikel sebagai bahan baku utama dalam produksi baterai lithium-ion untuk kendaraan listrik. Menurut International Energy Agency (IEA), permintaan nikel untuk sektor energi terbarukan diperkirakan akan meningkat hingga 19 kali lipat pada tahun 2040. Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat strategis, sekaligus menuntut pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna memaksimalkan manfaat ekonomi dari sumber daya ini (International Energy Agency, 2021).



**Gambar 1. 1 Tren Produksi Nikel Global Tahun 2019-2023**

Sumber: International Nickel Study Group, 2024



**Gambar 1. 2 Cadangan Nikel Dunia Tahun 2023**

Sumber: United States Geological Survey, 2024

Indonesia merupakan negara dengan cadangan dan produksi nikel terbesar di dunia. Menurut data dari United States Geological Survey (USGS), Indonesia memiliki cadangan nikel sebesar 55 juta ton pada tahun 2023, atau sekitar 54% dari total cadangan nikel global. Selain itu, Indonesia juga menjadi produsen nikel terbesar di dunia, dengan produksi mencapai 1 juta ton pada tahun 2021, mengalahkan Filipina yang sebelumnya memegang posisi teratas, terus naik hingga mencapai 2 juta ton pada tahun 2023. Keberadaan sumber daya nikel yang melimpah ini menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam industri global, terutama dalam

memasok bahan baku untuk produksi baterai kendaraan listrik, baja tahan karat, dan berbagai produk teknologi tinggi

Pada masa jabatan Presiden Joko Widodo, Indonesia menerapkan kebijakan ekspor nikel yang ketat, termasuk pelarangan ekspor bijih nikel mentah untuk mendukung hilirisasi industri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri serta menarik investasi asing di sektor pertambangan dan pengolahan nikel. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk nikel, Joko Widodo melanjutkan dan memperketat kebijakan hilirisasi yang telah ada. Salah satu langkah yang diambil adalah melarang ekspor bijih nikel mentah secara total pada tahun 2020, sehingga industri dalam negeri lebih terdorong untuk mengolah bijih nikel menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024)

Selain itu, Joko Widodo juga mendorong investasi dalam pembangunan smelter dan fasilitas pengolahan nikel lainnya di berbagai wilayah Indonesia. Dengan adanya investasi ini, Indonesia tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk setengah jadi dan jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Namun, implementasi kebijakan ini juga menghadapi tantangan dan dampak pada hubungan internasional Indonesia, terutama dengan negara-negara pengimpor utama seperti China dan Uni Eropa (Jakarta Post, 2020). Implementasi kebijakan ekspor nikel ini berdampak signifikan terhadap dinamika perdagangan internasional dan memicu reaksi dari berbagai negara dan perusahaan multinasional. Misalnya, China yang merupakan konsumen utama nikel Indonesia terpaksa mencari sumber alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara itu, Uni Eropa mengajukan keluhan ke *World Trade Organization* (WTO) terkait kebijakan pelarangan ekspor tersebut (World Trade Organization, 2020).

Gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia di WTO menjadi salah satu kasus perdagangan internasional yang paling diperdebatkan dalam beberapa tahun terakhir. (European Commission, 2022) mengkritik kebijakan Indonesia sebagai bentuk proteksionisme yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas. Uni Eropa berargumen bahwa kebijakan Indonesia membatasi akses mereka terhadap bahan baku penting untuk industri mereka, terutama dalam produksi baterai kendaraan listrik yang menjadi prioritas dalam agenda transisi energi mereka. Di sisi lain, Indonesia membela kebijakannya dengan alasan bahwa larangan ekspor bijih nikel mentah diperlukan untuk mendorong pembangunan industri hilir di dalam negeri dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dinikmati oleh rakyat Indonesia (European Commission, 2022).

Sementara itu, China, sebagai salah satu investor terbesar di sektor pertambangan dan industri nikel Indonesia, justru memanfaatkan kebijakan ini untuk memperkuat posisinya. China telah menanamkan investasi besar-besaran dalam pembangunan smelter dan fasilitas pengolahan nikel di Indonesia, seperti di Kawasan Industri Morowali di Sulawesi (Tempo, 2021). Investasi ini tidak hanya membantu Indonesia memenuhi tujuan industrialisasinya, tetapi juga memastikan bahwa China memiliki akses yang stabil terhadap pasokan nikel untuk memenuhi kebutuhannya yang besar (O'Rourke, 2021).

China telah menguasai lebih dari 70% produksi baterai kendaraan listrik global dan mengontrol 85% kapasitas pemrosesan nikel dunia, menjadikannya aktor kunci dalam rantai pasok baterai global (International Energy Agency, 2023). Untuk mempertahankan hegemoninya, China secara agresif mengamankan pasokan nikel Indonesia melalui investasi besar-besaran di sektor hilir. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM, 2023) menunjukkan bahwa 87% investasi smelter nikel di Indonesia berasal dari perusahaan China, dengan total realisasi investasi mencapai US\$14,3 miliar pada 2022. Dominasi ini diperkuat oleh kontrol China atas teknologi pengolahan nikel menjadi bahan baku baterai, yang membuat Indonesia

bergantung pada investasi dan teknologi China meski memiliki cadangan nikel terbesar di dunia (Reuters, 2023).

Persaingan antara Uni Eropa dan China dalam mengakses nikel Indonesia mencerminkan dinamika geopolitik yang lebih luas. Uni Eropa, yang berkomitmen pada transisi energi dan pengurangan emisi karbon, membutuhkan nikel untuk mengembangkan industri baterai kendaraan listrik. Sementara itu, China, sebagai pemain dominan dalam rantai pasok baterai global (International Energy Agency, 2023), berusaha mempertahankan hegemoninya dengan mengamankan pasokan nikel dari Indonesia. Persaingan ini menempatkan Indonesia pada posisi yang strategis, tetapi juga rentan terhadap tekanan dan konflik kepentingan dari kedua kekuatan global tersebut (International Energy Agency, 2021).

Dalam konteks hubungan internasional, kebijakan ekspor nikel Indonesia ini memengaruhi dinamika hubungan dengan negara-negara lain, terutama negara-negara maju yang bergantung pada impor nikel untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Larangan ekspor bijih nikel mentah telah memicu ketegangan dengan Uni Eropa, yang menganggap kebijakan ini sebagai bentuk proteksionisme yang merugikan kepentingan mereka (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2022). Gugatan yang diajukan Uni Eropa ke WTO menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam mempertahankan kebijakan nasionalnya di tengah tekanan global. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya interaksi antara kepentingan nasional dan kepentingan global dalam kebijakan ekspor nikel.

Kebijakan ekspor nikel Indonesia juga tidak lepas dari tantangan internal. Industri pertambangan dan pengolahan nikel di Indonesia didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar, termasuk yang didukung oleh investasi asing dari China. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan ketergantungan ekonomi pada China serta dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh eksploitasi nikel yang masif. Pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara kepentingan

nasional, tekanan internasional, dan keberlanjutan lingkungan (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021).

Meskipun kebijakan ini menimbulkan tantangan diplomatik, Indonesia tetap berkomitmen untuk memperkuat industri domestiknya dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global dan mendukung transisi energi bersih melalui pengembangan kendaraan listrik. (Indonesia Investment Coordinating Board, 2021).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penerapan kebijakan larangan ekspor yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bertujuan untuk memperketat kebijakan hilirisasi yang telah ada sehingga industri dalam negeri lebih terdorong untuk mengolah bijih nikel menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Namun, kebijakan ini memicu berbagai protes dari negara-negara pengimpor nikel seperti Uni Eropa dan China. Gugatan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia melalui WTO menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam mempertahankan kebijakan nasionalnya di tengah tekanan global. Berlandaskan pernyataan masalah penelitian ini, maka pertanyaan penelitian ini adalah **“Apa Kepentingan Indonesia Dalam Kebijakan Ekspor Nikel?”**.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penelitian ini, maka dibuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kebijakan ekspor nikel Indonesia.
2. Menganalisis kepentingan Indonesia dalam kebijakan ekspor nikel.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Memberikan wawasan yang mendalam mengenai dampak kebijakan ekspor nikel.
2. Memberikan pemahaman pada dampak kebijakan ekspor nikel, pemerintah dan pelaku industri dapat mengembangkan strategi untuk menarik lebih banyak investasi asing di sektor pertambangan dan pengolahan nikel, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang dapat dipelajari untuk mengkaji Dampak Kebijakan Ekspor Nikel Indonesia Di Era Masa Jabatan Jokowi Terhadap Hubungan Internasional. Referensi penelitian terdahulu akan memberikan kontribusi sebagai acuan bagi penelitian ini, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai topik yang dikaji

Penelitian yang pertama yaitu oleh Muhammad Agung dan Emmanuel Ariananto Waluyo Adi (2022) yang berjudul “Peningkatan Investasi dan Hilirisasi Nikel di Indonesia”, Penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan investasi dan hilirisasi nikel sebagai upaya mengoptimalkan nilai tambah sumber daya nikel yang berlimpah di Indonesia. Tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis dampak dari kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut.

Studi ini mengungkap bahwa larangan ekspor bijih nikel mentah telah berhasil mendorong harga nikel di pasar internasional, sehingga menciptakan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di sektor pengolahan nikel dalam negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah smelter baru yang dibangun di Indonesia, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap perekonomian negara dengan menciptakan lapangan kerja serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan tersebut juga memunculkan berbagai tantangan. Beberapa perusahaan tambang kecil

mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan aturan baru tersebut, terutama karena keterbatasan modal dan pengalaman dalam pengolahan bijih nikel. Selain itu, proses perizinan yang rumit dan regulasi yang sering berubah-ubah menjadi kendala tersendiri bagi para investor. Penulis menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam bentuk kemudahan perizinan, insentif fiskal, serta peningkatan infrastruktur pendukung seperti transportasi dan energi. Dukungan ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong partisipasi lebih banyak investor asing dalam proyek hilirisasi nikel.

Selanjutnya, penelitian ini juga menyoroti potensi hilirisasi nikel dalam mendukung agenda transisi energi bersih secara global. Nikel merupakan bahan utama dalam produksi baterai kendaraan listrik, yang memainkan peran penting dalam mengurangi emisi karbon dan memenuhi target keberlanjutan. Dengan demikian, hilirisasi nikel tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia, tetapi juga kontribusi signifikan terhadap upaya global dalam mengatasi perubahan iklim.

Secara keseluruhan, penelitian oleh Muhammad Agung dan Emmanuel Ariananto Waluyo Adi mendukung pandangan bahwa peningkatan investasi dan hilirisasi nikel di Indonesia adalah langkah strategis yang membawa manfaat jangka panjang bagi perekonomian dan lingkungan. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan pemerintah yang konsisten, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat industri pengolahan nikel yang kompetitif di pasar global.

Penelitian lainnya yang menjadi tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah penelitian oleh Dicky Dwi Radhica (2023) yang berjudul “Proteksionisme Nikel Indonesia dalam Perdagangan Dunia”, Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif serta teori proteksionisme dengan variabel kebijakan nasional dan kepentingan nasional untuk meninjau dampak kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah hilirisasi nikel oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk proteksionisme memberikan dampak positif berupa peningkatan produksi baterai di dalam negeri. Meskipun begitu,

studi ini juga menyoroti adanya tantangan seperti pembangunan smelter yang belum merata dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai.

Penelitian Radhica juga membahas implikasi proteksionisme nikel terhadap perdagangan dunia. Langkah proteksionis ini menyebabkan adanya ketegangan antara Indonesia dan mitra dagangnya yang selama ini bergantung pada ekspor bijih nikel mentah. Dampak jangka panjang proteksionisme ini juga mencakup kenaikan harga nikel di pasar internasional yang menciptakan hambatan bagi negara-negara pengimpor dalam memenuhi kebutuhan nikel mereka.

Lebih lanjut, penelitian ini mengungkap kebijakan proteksionis nikel Indonesia telah membawa manfaat, seperti peningkatan nilai ekspor produk olahan nikel dan peningkatan lapangan kerja di sektor pengolahan nikel. Namun, kebijakan ini juga menghadapi berbagai kritik dan tantangan, terutama dari negara-negara mitra dagang yang mengajukan sengketa dagang melalui WTO. Beberapa negara menganggap kebijakan ini sebagai langkah yang tidak adil dan melanggar prinsip perdagangan bebas.

Untuk memperkuat kebijakan hilirisasi nikel, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Indonesia meningkatkan pembangunan smelter dan pengembangan keterampilan sumber daya manusia. Selain itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, industri, dan akademisi dalam menciptakan ekosistem yang mendukung hilirisasi nikel di Indonesia. Strategi ini akan membantu Indonesia dalam mengatasi tantangan yang ada dan memaksimalkan potensi ekonominya.

Secara keseluruhan, penelitian "Proteksionisme Nikel Indonesia dalam Perdagangan Dunia" oleh Radhica memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana proteksionisme nikel dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia, meskipun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Kebijakan hilirisasi nikel dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta mendukung transisi energi bersih dunia.

Kemudian yang ketiga yaitu penelitian oleh Muhammad Faisal dan Rizki Amalia, yang berjudul “Peran Hilirisasi Mineral dalam Meningkatkan Daya Saing Global”. Muhammad Faisal dan Rizki Amalia (2021) dalam penelitiannya mengkaji bagaimana hilirisasi mineral dapat menjadi faktor penentu dalam meningkatkan posisi kompetitif suatu negara di pasar global. Dalam penelitian Muhammad Faisal dan Rizki Amalia terdapat beberapa temuan utama yaitu;

1. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi, Hilirisasi mineral mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi dengan mengubah bahan mentah menjadi produk yang memiliki harga jual lebih tinggi. Misalnya, bijih nikel yang diolah menjadi stainless steel atau baterai lithium untuk kendaraan listrik memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan diekspor dalam bentuk mentah. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas global.
2. Diversifikasi Industri dan Pengurangan Ketergantungan Ekspor Bahan Mentah. Negara-negara yang mengembangkan industri hilir mineral cenderung memiliki struktur ekonomi yang lebih beragam. Hilirisasi mendorong lahirnya industri manufaktur berbasis mineral, seperti industri otomotif, elektronik, dan energi terbarukan. Ini mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, yang seringkali rentan terhadap gejolak pasar internasional.
3. Peningkatan Daya Saing Global melalui Inovasi Teknologi. Hilirisasi mineral memerlukan investasi dalam teknologi pengolahan dan inovasi. Negara yang berhasil mengembangkan teknologi pengolahan mineral canggih akan memiliki keunggulan kompetitif di pasar global. Contohnya, pengembangan baterai lithium-ion untuk kendaraan listrik telah menjadi fokus utama beberapa negara, seperti China dan Korea Selatan, yang kini memimpin pasar global.
4. Peran Kebijakan Pemerintah dan Insentif Investasi. Kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam mendorong hilirisasi mineral. Insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan dukungan

infrastruktur dapat menarik investasi asing dan domestik untuk mengembangkan industri hilir. Studi ini mencontohkan kebijakan hilirisasi mineral di Indonesia, seperti larangan ekspor bijih nikel, yang berhasil mendorong investasi di industri pengolahan nikel.

5. Dampak terhadap Perdagangan Internasional. Hilirisasi mineral dapat meningkatkan posisi suatu negara dalam rantai pasok global. Negara yang mampu memproduksi produk hilir mineral berkualitas tinggi akan memiliki akses yang lebih baik ke pasar internasional dan dapat membangun hubungan perdagangan yang lebih kuat dengan negara-negara maju.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah hilirisasi mineral merupakan strategi penting untuk meningkatkan daya saing global suatu negara. Dengan mengembangkan industri hilir, negara tidak hanya dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi tetapi juga mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, mendiversifikasi industri, dan memanfaatkan inovasi teknologi untuk bersaing di pasar global. Namun, keberhasilan hilirisasi mineral sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang mendukung, investasi dalam teknologi, dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

Penelitian yang berikutnya yaitu “Strategi Hilirisasi Mineral dalam Mendorong Industrialisasi Nasional” oleh Ahmad Redi dan Togar Alam Napitupulu (2020), dalam penelitiannya mengkaji strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk memanfaatkan potensi sumber daya mineral dalam mendukung pembangunan industri nasional. Studi ini menekankan pentingnya integrasi antara sektor pertambangan dan industri manufaktur, di mana bahan mentah seperti bijih nikel dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti stainless steel atau baterai lithium, yang kemudian digunakan dalam industri otomotif, elektronik, dan energi terbarukan.

Kebijakan pemerintah memainkan peran sentral dalam mendorong hilirisasi mineral. Peneliti menyoroti pentingnya regulasi yang mendukung, seperti larangan ekspor bahan mentah, insentif fiskal untuk investasi di sektor hilir, dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Selain itu, peningkatan kapasitas

teknologi dan inovasi melalui investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) serta transfer teknologi dari negara maju juga menjadi faktor kunci. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten melalui pendidikan dan pelatihan vokasi juga diperlukan untuk menciptakan tenaga kerja terampil di sektor pertambangan dan industri pengolahan mineral.

Hilirisasi mineral tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi tetapi juga mendorong pertumbuhan industri nasional. Dengan mengembangkan industri hilir, negara dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan pada impor produk jadi. Studi ini menunjukkan bahwa negara-negara seperti Australia dan Chile telah berhasil memanfaatkan hilirisasi mineral untuk membangun ekonomi yang stabil dan berdaya saing. Oleh karena itu, hilirisasi mineral merupakan strategi penting untuk mendorong industrialisasi nasional yang berkelanjutan.

Kemudian penelitian yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syafi'i Anwar (2018) yang berjudul "Kepentingan Nasional Indonesia dalam Kebijakan Luar Negeri di Era Joko Widodo". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepentingan nasional Indonesia diwujudkan dalam kebijakan luar negeri di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Penelitian ini berfokus pada upaya Indonesia untuk meningkatkan posisi strategisnya di kancah global melalui kebijakan ekonomi dan keamanan. Anwar menggunakan pendekatan realisme klasik, khususnya teori kepentingan nasional dari Hans Morgenthau, sebagai kerangka teoritis untuk memahami dinamika kebijakan luar negeri Indonesia.

Dalam tulisannya Anwar mengidentifikasi beberapa kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi yang mencerminkan upaya untuk mencapai kepentingan nasional, antara lain: 1.Peningkatan Kerja Sama Ekonomi: Indonesia aktif menjalin kerja sama ekonomi dengan berbagai negara, termasuk melalui inisiatif seperti Poros Maritim Dunia dan Kemitraan Strategis. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan investasi asing, memperluas pasar ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. 2.Pertahanan dan Keamanan: Indonesia memperkuat kapasitas pertahanannya melalui

modernisasi alutsista (alat utama sistem senjata) dan kerja sama keamanan dengan negara-negara sahabat. Hal ini dilakukan untuk melindungi kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia, terutama di kawasan perbatasan dan laut.

3. Diplomasi Multilateral: Indonesia aktif dalam forum-forum multilateral seperti ASEAN, PBB, dan G20 untuk memperjuangkan kepentingan nasional, termasuk isu-isu seperti perdamaian global, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini relevan karena memberikan kerangka teoritis dan empiris tentang bagaimana kepentingan nasional Indonesia diwujudkan melalui kebijakan luar negeri. Khususnya, penelitian ini dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan hilirisasi nikel sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional, termasuk peningkatan nilai tambah ekonomi dan kedaulatan sumber daya alam. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana Indonesia menghadapi tekanan dari negara-negara maju seperti Uni Eropa dalam konteks kebijakan ekonomi dan perdagangan.

## **2.2 Landasan Konseptual**

### **2.2.1 Kepentingan Nasional**

Robert Keohane, salah satu tokoh utama dalam Liberal Institusionalisme, berpendapat bahwa kepentingan nasional suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan material (seperti ekonomi dan keamanan), tetapi juga dipengaruhi oleh institusi internasional, interdependensi ekonomi, dan pertimbangan norma global (Keohane R. O., 1984). Keohane mendefinisikan kepentingan nasional sebagai seperangkat tujuan strategis yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, dan kelembagaan internasional. Keohane berargumen bahwa negara tidak hanya bertindak berdasarkan kekuatan material, tetapi juga mempertimbangkan interdependensi global dan peran institusi dalam mencapai kepentingannya (Keohane R. O., 1984). Dalam konteks ini, kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia dapat dilihat sebagai

upaya memaksimalkan keuntungan nasional di tengah sistem perdagangan yang kompleks.

Keohane mengidentifikasi tiga dimensi utama kepentingan nasional yaitu ekonomi, keamanan, dan legitimasi politik. Dimensi ekonomi mencakup upaya meningkatkan kesejahteraan melalui kerja sama perdagangan dan investasi. Sementara dimensi keamanan tidak hanya terbatas pada militer, tetapi juga keamanan energi dan pangan. Yang unik adalah penekanannya pada legitimasi politik, di mana negara harus mempertimbangkan norma dan harapan masyarakat internasional (Keohane & Nye, *Power and Interdependence* (4th ed.), 2012).

Menurut Keohane, kepentingan ekonomi suatu negara mencakup upaya meningkatkan kesejahteraan melalui penguasaan sumber daya strategis (Keohane & Nye, *Power and Interdependence* (4th ed.), 2012). Selain ekonomi, Keohane menyoroti aspek politik dan keamanan sebagai bagian dari kepentingan nasional (Keohane & Nye, *Power and Interdependence* (4th ed.), 2012).

Konsep utama Keohane adalah bagaimana institusi internasional mempengaruhi kalkulasi kepentingan nasional. Melalui mekanisme seperti aturan, norma, dan sanksi, institusi seperti WTO atau PBB dapat mengubah biaya dan manfaat dari berbagai pilihan kebijakan (Keohane R. O., 1989). Contohnya, kasus gugatan Uni Eropa di WTO terhadap Indonesia menunjukkan dinamika antara kepentingan nasional dan aturan perdagangan global.

Robert Keohane dalam karyanya *International Institutions and State Power* (1989) menjelaskan bahwa kepatuhan negara terhadap putusan organisasi internasional seperti WTO bersifat kondisional dan tidak absolut. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap pandangan idealis yang menganggap negara akan selalu patuh pada hukum internasional (Keohane R. O., 1989).

### 2.2.2 Hilirisasi

Friedrich List, seorang ekonom Jerman abad ke-19, mengemukakan konsep hilirisasi sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Hilirisasi merujuk pada proses pengembangan industri hilir, yaitu industri yang mengolah bahan baku atau produk setengah jadi menjadi produk akhir bernilai tambah tinggi (List, 1841). List menekankan bahwa hilirisasi adalah langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan membangun kemandirian ekonomi. Dengan mengembangkan industri hilir, suatu negara dapat memperpanjang rantai nilai, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sekaligus mendorong inovasi teknologi (List, 1841).

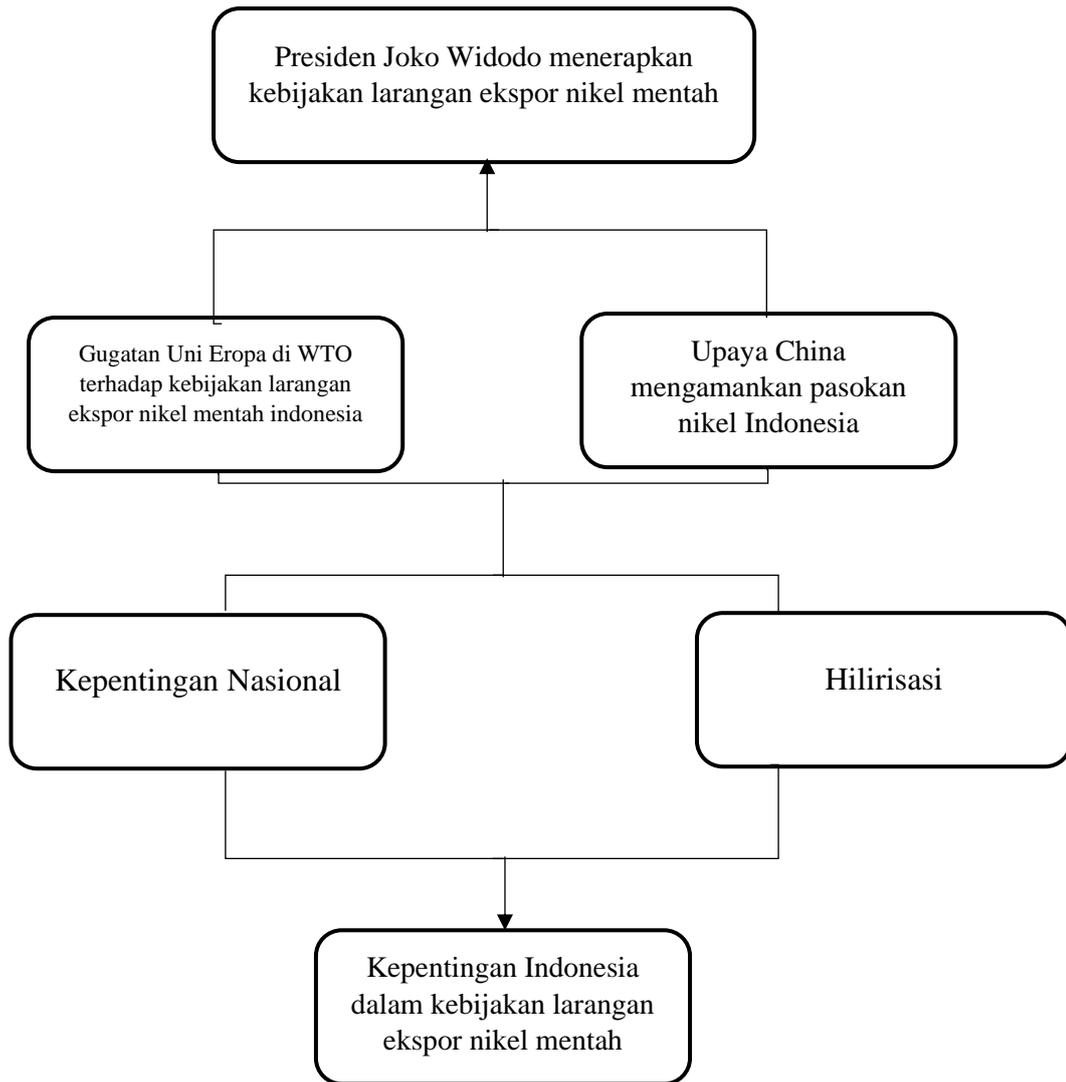
Menurut List, peran pemerintah sangat krusial dalam mendorong hilirisasi. Ia berpendapat bahwa negara-negara berkembang perlu melindungi industri domestik mereka melalui kebijakan seperti tarif impor dan subsidi. Tanpa perlindungan ini, industri hilir akan kesulitan bersaing dengan produk-produk impor dari negara-negara industri maju (List, 1841). List melihat hilirisasi sebagai bagian dari strategi nasional untuk mencapai industrialisasi dan mengurangi ketergantungan pada kekuatan asing. Dengan intervensi pemerintah yang tepat, industri hilir dapat tumbuh dan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang (List, 1841).

Konsep hilirisasi Friedrich List menawarkan pandangan yang relevan bagi negara-negara berkembang yang berusaha meningkatkan nilai tambah ekonomi mereka. Hilirisasi tidak hanya meningkatkan pendapatan nasional melalui diversifikasi ekonomi, tetapi juga menciptakan struktur ekonomi yang lebih berkelanjutan (List, 1841). Pemikiran List mengingatkan kita akan pentingnya kebijakan industri yang proaktif dan perlindungan terhadap sektor-sektor strategis dalam mencapai kemajuan ekonomi. Dengan demikian, hilirisasi menjadi kunci untuk membangun kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya mentah. Dengan mengolah nikel di dalam negeri, Indonesia dapat mengekspor produk-produk bernilai tinggi, bukan hanya bijih nikel mentah. Hal ini akan meningkatkan pendapatan negara dan

menciptakan lapangan kerja. Selain itu, hilirisasi juga merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengembangkan industri manufaktur dalam negeri, terutama di sektor hilir pertambangan.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini menganalisis kebijakan ekspor nikel Indonesia sebagai upaya untuk melindungi kepentingan nasional, termasuk peningkatan nilai tambah ekonomi, kedaulatan sumber daya alam, dan posisi strategis global. Dan menjelaskan bagaimana kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah mendorong hilirisasi nikel di Indonesia. Berbagai tantangan yang muncul seperti gugatan yang dilakukan Uni Eropa ke *World Trade Organization* (WTO) terkait kebijakan pelarangan ekspor tersebut, dan tantangan lain seperti ketergantungan pada investasi asing (terutama China) dan dampak lingkungannya. Peneliti akan menggunakan konsep kepentingan nasional dan hilirisasi untuk menganalisis dinamika kebijakan ekspor nikel Indonesia, gugatan Uni Eropa di WTO, dan upaya China untuk mengamankan pasokan nikel. Berikut bagan kerangka pemikiran penelitian ini:



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

Sumber : disusun oleh Peneliti

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diambil oleh individu atau kelompok terkait masalah sosial. Metode ini bermanfaat untuk menginterpretasi, menggali, atau memperoleh pemahaman mendalam tentang berbagai aspek seperti keyakinan, sikap, atau perilaku manusia (Creswell, 2013). Secara umum, penelitian kualitatif dapat diterapkan untuk mempelajari kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, konsep, fenomena, masalah sosial, dan berbagai topik lainnya (Creswell, 2013).

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan masalah pokok yang diteliti. Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi permasalahan atau tema dalam penelitian sehingga dapat memperjelas bahasan serta mempermudah penelitian dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Penelitian ini berfokus pada Kepentingan Indonesia dalam menerapkan kebijakan larangan ekspor nikel yang dilakukan Presiden Indonesia Joko Widodo pada tahun 2020-2024.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif sekunder, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder yang peneliti gunakan didalam penelitian ini bersumber dari Data kualitatif sekunder. Sumber data sekunder lainnya didapatkan melalui internet. Adapun sumber-sumber data dari internet diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS)([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)), website International Nickel Study Group (INSG) ([www.insg.org](http://www.insg.org)), website United States Geological Survey (USGS) ([www.usgs.gov](http://www.usgs.gov)).

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur dan data sekunder yang kemudian menjadi triangulasi data. Studi Literatur merupakan proses mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik penelitian, yang kemudian dianalisis untuk memahami konteks kebijakan. Data-data tersebut diperoleh dari sumber sumber yang sesuai dengan topik penelitian dan konsep serta teori yang peneliti gunakan. Sumber data dari studi literatur diperoleh dari dokumen resmi, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan laporan dari lembaga internasional terkait topik penelitian. Triangulasi data digunakan untuk menggabungkan data untuk meningkatkan validitas penelitian.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan serangkaian prosedur yang dilakukan oleh peneliti untuk memecahkan masalah penelitian menjadi bagian-bagian yang lebih spesifik, sehingga semua aspek yang perlu dijelaskan untuk menjawab pertanyaan penelitian dapat dipahami dengan lebih jelas. Dengan demikian, teknik analisis data diperlukan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan agar dapat disajikan sebagai informasi yang terstruktur dan sistematis (Creswell, 2013). Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Mile, Huberman, dan Saldana. Adapun tahapan-tahapan dalam teknik analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Tahap Kondensasi Data**

Kondensasi data merupakan proses penyederhanaan data agar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang dianggap relevan akan dipilih dan digunakan, sedangkan data yang tidak relevan akan dijadikan sebagai informasi pendukung. Data yang telah disederhanakan dan dipadatkan akan memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi dan memperoleh data tambahan yang diperlukan. Berikut adalah tahapan kondensasi data dalam penelitian ini:

- 1) Peneliti melakukan tinjauan dengan mempelajari studi-studi sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

- 2) Peneliti mengumpulkan informasi relevan dari sumber-sumber sekunder terpercaya, seperti situs resmi Badan Pusat Statistik, United States Geological Survey, jurnal ilmiah, dan portal berita yang kredibel. Selanjutnya, peneliti mengelompokkan data-data tersebut berdasarkan kategorinya.
- 3) Peneliti mengintegrasikan atau menggabungkan data sekunder yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

## 2. Tahap Penyajian Data

Tahap selanjutnya dalam teknik analisis data adalah penyajian data. Pada tahap ini, data disajikan dalam bentuk grafik dan teks untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terstruktur. Penyusunan data secara sistematis dalam tahap ini memudahkan peneliti dalam memahami konteks penelitian dan melakukan analisis lebih mendalam terhadap data yang disajikan.

## 3. Tahap Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dan memverifikasi data yang telah dikumpulkan dengan menjelaskan temuan-temuan penelitian. Penjelasan ini dapat berupa deskripsi atau jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Selain itu, peneliti juga menyampaikan pandangan atau interpretasi terhadap hasil penelitian. Dalam menyampaikan pandangannya, peneliti harus tetap menjaga objektivitas selama proses analisis dan dalam menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Kebijakan hilirisasi nikel melalui pelarangan ekspor bijih mentah di era pemerintahan Joko Widodo (2020–2024) mencerminkan upaya strategis Indonesia untuk mengubah paradigma ekonomi dari ketergantungan ekspor bahan mentah menjadi produsen produk bernilai tambah tinggi. Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini telah mencapai sejumlah capaian signifikan, meskipun diiringi tantangan kompleks yang perlu diatasi.

Pertama, dari perspektif ekonomi, kebijakan hilirisasi berhasil meningkatkan nilai tambah ekspor nikel secara dramatis. Nilai ekspor produk hilir nikel melonjak dari USD 1,2 miliar (2019) menjadi USD 45 miliar (2024), dengan kontribusi terhadap PDB meningkat dari 0,7% menjadi 2,1%. Pembangunan 51 smelter dan proyek strategis seperti pabrik baterai Hyundai-LG di Karawang telah menarik investasi asing senilai USD 35 miliar, menciptakan 48.000 lapangan kerja langsung dan 120.000 pekerjaan tidak langsung. Namun, dominasi investasi China (80% smelter) dan ketergantungan teknologi pada perusahaan asing menjadi risiko jangka panjang yang mengancam kedaulatan industri.

Kedua, dari dimensi politik, kebijakan ini memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah global. Pelarangan ekspor bijih mentah memaksa negara-negara seperti Uni Eropa dan China untuk berinvestasi di industri hilir dalam negeri, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global. Namun, tekanan geopolitik seperti gugatan Uni Eropa di WTO dan dominasi China dalam kepemilikan smelter menunjukkan betapa kebijakan nasional harus berhadapan dengan kepentingan global yang saling bersaing. Meski kalah dalam putusan WTO, Indonesia tetap

mempertahankan kebijakan ini dengan argumen kedaulatan sumber daya alam (Pasal 33 UUD 1945), menunjukkan komitmen untuk memprioritaskan kepentingan domestik.

Namun, Dominasi teknologi China dalam industri nikel Indonesia merupakan isu strategis yang memicu ketergantungan struktural permanen, meskipun Indonesia menguasai 54% cadangan nikel global. Kebijakan hilirisasi era Jokowi (2020-2024) telah sukses membangun infrastruktur fisik seperti 51 smelter dan kawasan industri terintegrasi. Namun gagal dalam mewujudkan kemandirian teknologi. Faktanya, 90% paten pengolahan nikel laterit (HPAL) dikuasai entitas China, sementara 87% smelter di Indonesia dimiliki atau didanai investor China.

Analisis teoritis menggunakan perspektif Robert Keohane (kepentingan nasional) dan Friedrich List (hilirisasi) memperlihatkan bahwa kebijakan ini merupakan sintesis antara rasionalitas ekonomi dan proteksi industri. Keohane menekankan bahwa Indonesia bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan melalui kontrol pasokan global dan peningkatan daya saing. Sementara itu, List akan melihat hilirisasi sebagai langkah tepat untuk membangun industri domestik, meski proteksi yang diberikan belum diimbangi dengan penguatan kapasitas teknologi mandiri.

Kebijakan hilirisasi nikel Indonesia telah membuktikan diri sebagai instrumen transformatif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat posisi strategis di pasar global. Namun, keberhasilan jangka panjang bergantung pada kemampuan Indonesia mengatasi tantangan ketergantungan teknologi, tekanan geopolitik, dan dampak lingkungan. Dengan mengintegrasikan kebijakan ekonomi, diplomasi, dan keberlanjutan, Indonesia tidak hanya dapat menjadi pemasok bahan baku global, tetapi juga pemimpin inovasi dalam industri hijau. Langkah-langkah tersebut tidak hanya relevan dengan teori kepentingan nasional Keohane dan proteksi industri List, tetapi juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030.

## 5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan tantangan yang dihadapi, berikut rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan manfaat kebijakan larangan ekspor nikel mentah :

- 1) Meningkatkan anggaran R&D dari 0,2% menjadi 2% PDB untuk mendorong inovasi teknologi pengolahan nikel, seperti hidrometalurgi ramah lingkungan dan daur ulang limbah tambang.
- 2) Mendorong diversifikasi investasi dengan menarik perusahaan dari Jepang, Korea Selatan, dan Eropa untuk mengurangi dominasi China. Contoh: Menawarkan kemudahan izin bagi investor yang bersedia membangun pabrik katoda baterai.
- 3) Memperkuat posisi di WTO melalui aliansi dengan negara berkembang penghasil komoditas (Grup G33) untuk memperjuangkan amendemen aturan perdagangan yang mengakomodasi hak pembangunan (right to development).
- 4) Menginisiasi kerja sama bilateral dengan Uni Eropa dan AS, seperti Critical Raw Materials Partnership, untuk mengakses pasar dan teknologi tinggi sambil menjaga kepentingan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- ACEA. (2023). *Impact of Nickel Price Volatility on EV Production Costs*. Brussels: European Automobile Manufacturers' Association.
- Bappenas. (2023). *Laporan pertumbuhan ekonomi regional Indonesia 2023*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- BKPM. (2023). *Laporan Dampak Investasi Smelter Nikel di Morowali*. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
- BKPM. (2023). *Laporan Realisasi Investasi Triwulan IV 2022*. Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- BKPM. (2024). *Laporan Realisasi Investasi Sektor Minerba 2020–2024*. Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Bloomberg. (2022, Maret 8). *Nickel Prices Soar 250% as Russia-Ukraine War Roils Metals Market*. Retrieved from Bloomberg.
- BMI. (2023, Maret 15). *Nickel Market Outlook: The Race for Battery Supply Chains*. London: Benchmark Mineral Intelligence. Retrieved from Benchmark Mineral Intelligence.
- BPS. (2023). *Statistik ketenagakerjaan kawasan smelter nikel*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2024). *Statistik Dampak Ekonomi Hilirisasi Nikel di Maluku Utara*. Badan Pusat Statistik.
- Brookings Institution. (2023). *The Geopolitics of Critical Minerals: Indonesia's Nickel Strategy*. Washington, DC: Brookings Press.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- CRU Group. (2024). *Global Nickel Market Outlook 2024*. London: CRU International.
- CSIS. (2023). *Assessing China's Dominance in Indonesia's Nickel Industry*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies Indonesia.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2022, Oktober 3). Gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) Mengancam Hilirisasi Industri Pertambangan di Indonesia. *Artikel Kanwil DJKN Kalimantan Barat*.
- Dirjen Minerba. (2024). *Laporan triwulanan perkembangan hilirisasi mineral logam*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Dirjen Minerba. (2024). *Progres Proyek HPAL di Halmahera*. Kementerian ESDM.
- EUROFER. (2022). *Annual Economic Report 2022: Impact of Nickel Export Restriction*. Brussels: European Steel Association.
- European Commission. (2022). *Trade Policy Review: Indonesia*. Brussels.
- Firdaus, S. R. (2022). *Pembatasan ekspor nikel: Kebijakan nasional vs unfairness treatment hukum investasi internasional*. LAN.
- Hyundai LG Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Proyek Baterai EV*. PT Hyundai LG Indonesia.
- ICBC. (2023). *Annual Report on Nickel Industry Investments in Indonesia*. Beijing: Industrial and Commercial Bank of China.
- IEA. (2023). *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions 2023*. Paris: International Energy Agency.
- IEA. (2024). *Global EV Outlook 2024*. Paris: International Energy Agency.
- Indonesia Investment Coordinating Board. (2021). *Investment in Nickel Processing Industry*.
- International Energy Agency. (2021). *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions*. Paris.

- International Energy Agency. (2023). *Global EV Outlook 2023*. Paris: IEA.
- International Nickel Study Group. (2022). *World Nickel Statistics*.
- Jakarta Post. (2020). *Indonesia's Nickel Export Ban and Its Impact on Global Trade*.
- Joko Widodo. (2024). *Presiden Jokowi: Hilirisasi Nikel dan Sumber Daya Alam Jadi Kunci Peningkatan Ekonomi Nasional*. Jakarta: BPPI Setpres.
- Kemdikbud. (2023). *Program link and match SMK dengan industri smelter*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemenko Marves. (2023). *Laporan Implementasi Perpres No. 55/2022 tentang Percepatan Penguasaan Teknologi Baterai Kendaraan Listrik*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.
- Kemenperin. (2024). *Roadmap Industri Baterai Kendaraan Listrik*.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2021). *Laporan Kinerja Sektor Pertambangan*. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Kementerian ESDM. (2019). *Statistik Ekspor Nikel 2010-2019*. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Kementerian ESDM. (2022). *Laporan Kinerja Sektor Minerba 2022*. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Kementerian ESDM. (2024). *Statistik Hilirisasi Mineral 2017-2023*. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024, September 19). *Presiden Jokowi: Hilirisasi Nikel dan Sumber Daya Alam Jadi Kunci Peningkatan Ekonomi Nasional*.
- Kemlu. (2023). *Strategi Diplomasi Indonesia dalam Menghadapi Gugatan Nikel di WTO*. Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat Kemlu.

- Kemnaker. (2023). *Data Penyerapan Tenaga Kerja di Kawasan Industri Minerba*. Kementerian Ketenagakerjaan.
- Kemnaker. (2023). *Evaluasi Program Pelatihan SDM Hilirisasi Minerba*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan.
- Keohane , R. O., & Nye, J. (2012). *Power and Interdependence (4th ed.)*. Longman.
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton: Princeton University Press.
- Keohane, R. O. (1989). *International Institutions and State Power*. Boulder: Westview Press.
- LIPI. (2023). *Economic Impact Assessment of Nickel Export Ban*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- List, F. (1841). *The National System of Political Economy*. New York: University of Michigan.
- LPEM UI. (2023). *Dampak hilirisasi nikel terhadap ketenagakerjaan di Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia.
- Muhammad Agung, E. A. (2022). Peningkatan Investasi Dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*.
- OECD. (2023). *R&D Tax Incentives in South Korea*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- O'Rourke, K. (2021). *Reformasi dan Jokowi: Politik Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Radhica, D. D. (2023). Proteksionisme Nikel Indonesia dalam Perdagangan Dunia. *Journal of Trade Development and Studies*.
- Reuters. (2023). *China's Tsingshan Dominates Indonesia Nickel Boom*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/>

- Reuters. (2023, Juni 15). *Global Race for Nickel: China, EU, and US Compete for Supply*. Retrieved from Reuters.
- Reuters. (2024, April 5). *China's Tsingshan Expands Control Over Indonesia's Nickel Industry*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com>
- Simamora, A. P. (2021). Dampak UU No. 3/2020 terhadap Industri Pertambangan Skala Kecil. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*.
- Tempo. (2021, September 26). *China Bangun Proyek Lithium di Sulawesi Senilai Hampir Rp 5 Triliun*. Retrieved from <https://www.tempo.co/internasional/china-bangun-proyek-lithium-di-sulawesi-senilai-hampir-rp-5-triliun-470236>
- Tirto.id. (2023, April 18). *OPEC Versi Nikel: Pemberontakan RI Pada Penjajah Kekayaan Alam*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/opec-versi-nikel-pemberontakan-ri-pada-penjajah-kekayaan-alam-gEQt>
- UNCTAD. (2021). *Trade and Development Report 2021: From recovery to resilience*. United Nations.
- Walhi. (2023). *Dinamika konflik agraria di kawasan tambang nikel*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
- White House. (2023). *Fact Sheet: U.S.-Indonesia Partnership on Clean Energy*. Washington DC.
- WIPO. (2023). *Global Innovation Index 2023*. World Intellectual Property Organization.
- World Trade Organization. (2020). *Complaint by the European Union against Indonesia's Nickel Export Ban*.
- WTO. (2023). *Dispute Settlement Compliance Report*. Geneva: World Trade Organization.